

## RINGKASAN

Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara yang mendukung operasional pemerintahan dan perekonomian. Salah satu indikator penting untuk mengevaluasi keterkaitan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi adalah *tax buoyancy*, yang mengukur responsivitas penerimaan pajak terhadap perubahan produk domestik bruto (PDB). Indikator ini menunjukkan sejauh mana sistem perpajakan mampu menangkap potensi pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi faktor krusial dalam memastikan penerimaan pajak yang berkelanjutan dan sesuai perkembangan ekonomi. Sebagai salah satu provinsi di pulau Jawa, Jawa Tengah menunjukkan nilai *tax buoyancy* yang rendah, meskipun penerimaan pajak daerah mencapai Rp 21.737 miliar pada tahun 2023. Posisi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan *tax buoyancy* terendah di Pulau Jawa, mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi ini adalah keberadaan aktivitas *shadow economy*, yang menciptakan bias dalam estimasi potensi pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas *shadow economy* terhadap *tax buoyancy*. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan memanfaatkan model regresi data panel berbasis metode *Fixed Effect Model* untuk mengevaluasi hubungan antara *shadow economy* dan *tax buoyancy*. Dalam penelitian ini, *tax buoyancy* berperan sebagai variabel dependen, sementara variabel independen terdiri atas jumlah penduduk, investasi, dan *shadow economy*. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi, yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ketenagakerjaan diterapkan sebagai kerangka analisis utama untuk memahami besaran *shadow economy* dan melihat pengaruhnya terhadap *tax buoyancy*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan negatif signifikan terhadap *tax buoyancy*, sementara investasi menunjukkan hubungan positif yang tidak signifikan. Di sisi lain, *shadow economy* memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap *tax buoyancy*. Berdasarkan temuan ini, integrasi sektor informal ke dalam sistem formal menjadi hal yang mendesak. Kebijakan insentif, penyederhanaan perpajakan, dan penguatan regulasi, seperti penyediaan fasilitas pendaftaran usaha yang sederhana dan terjangkau serta pemberlakuan kebijakan penghapusan atau pengampunan pajak, dapat mendorong pelaku usaha mencatatkan aktivitasnya secara legal. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan *tax buoyancy* di Jawa Tengah.

**Kata Kunci:** Ekonomi Bayangan, Responsivitas Pajak, Pendekatan Ketenagakerjaan.

## **SUMMARY**

*Taxes serve as the main source of state revenue that supports government operations and the economy. One important indicator to evaluate the link between tax and economic growth is tax buoyancy, which measures the responsiveness of tax revenue to changes in gross domestic product (GDP). This indicator shows the extent to which the tax system is able to capture the potential of economic growth, thus becoming a crucial factor in ensuring tax revenue that is sustainable and in line with economic development. As one of the provinces on the island of Java, Central Java shows a low tax buoyancy value, even though local tax revenue reached IDR 21,737 billion in 2023. Central Java's position as the province with the lowest tax buoyancy in Java indicates that the potential for tax revenue has not been optimally utilized. One factor that is thought to influence this condition is the existence of shadow economy activities, which create bias in the estimation of tax potential and economic growth.*

*This study aims to analyze the effect of shadow economy activities on tax buoyancy. The approach used is quantitative analysis by utilizing a panel data regression model based on the Fixed Effect Model method to evaluate the relationship between the shadow economy and tax buoyancy. In this study, tax buoyancy acts as the dependent variable, while the independent variables consist of population, investment, and shadow economy. The data used is secondary data obtained from official sources, namely the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Statistics Agency (BPS). The employment approach is applied as the main analytical framework to understand the size of the shadow economy and see its effect on tax buoyancy.*

*The analysis shows that population has a significant negative relationship with tax buoyancy, while investment shows an insignificant positive relationship. On the other hand, the shadow economy has a significant positive relationship with tax buoyancy. Based on these findings, the integration of the informal sector into the formal system is urgent. Incentive policies, tax simplification, and regulatory strengthening, such as the provision of simple and affordable business registration facilities and the enactment of a tax write-off or amnesty policy, can encourage businesses to register their activities legally. This step is expected to increase tax buoyancy in Central Java.*

**Keywords: Shadow Economy, Tax Buoyancy, Employment Approach Model.**